

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya di era kontemporer saat ini telah ditemukan berbagai kajian dalam hubungan internasional yang menarik untuk dibahas, salah satunya adalah hubungan antar negara yang memiliki kepentingan berbeda dan dapat memicu konflik khususnya di kawasan Timur Tengah. Artinya bahwa dalam konteks hubungan internasional suatu negara memandang pentingnya meningkatkan pengaruhnya dalam aspek politik maupun ekonomi. Terlepas dari hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang suatu negara dapat menggunakan cara apapun dalam menyebarluaskan pengaruhnya bahkan dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Selain itu hal lainnya yang juga penting untuk diketahui bahwa konflik dalam fenomena hubungan internasional merupakan sesuatu yang alamiah terjadi karena dipicu oleh adanya perbedaan pendapat dalam memandang sesuatu (Galtung, 2007, p. 17). Kemudian konflik yang terjadi secara terus menerus tentunya dapat memberikan ancaman terhadap stabilitas politik yang pada akhirnya akan mendorong negara-negara di dalam suatu kawasan senantiasa terlibat secara aktif dalam suatu konflik. Di satu sisi bahwa suatu negara memiliki kekuatan tersendiri dalam berbagai bidang untuk mencapai kepentingan negaranya.

Di sisi lain, negara juga dapat memanfaatkan situasi atau kondisi yang sedang terjadi di negara lainnya dalam usahanya untuk meningkatkan pengaruhnya. Untuk itu perlu diketahui juga bahwa sampai saat ini banyak ditemukan konflik antar negara yang semakin kompleks. Maka dari itu, memerlukan usaha yang konstruktif dan berkelanjutan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berbicara mengenai salah satu konflik yang terjadi hingga saat ini adalah di kawasan Timur Tengah yang melibatkan aktor negara dalam hal ini Iran dan Arab Saudi. Adapun pemicu yang melatarbelakangi terjadinya konflik antara Iran dengan Arab Saudi yang semakin berkelanjutan disebabkan oleh adanya dimensi sektarianisme (Patnistik, 2016). Lebih lanjut dimensi sektarianisme dipandang sebagai faktor utama dalam konflik Arab Saudi dan Iran yang mengalami keberlanjutan

Untuk itu maksud dari dimensi sektarianisme adalah bahwa Iran dan Arab Saudi memiliki pandangan berbeda terkait mengenai agama Islam dalam versi yang berbeda. Karena Muslim telah terpisah dalam dua golongan yang berbeda diantaranya adalah Sunni dan Syi'ah. Sehingga dalam konteks Timur Tengah, perbedaan paham keagamaan antara Sunni dan Syi'ah cenderung dikaitkan dengan adanya konflik untuk senantiasa mendapatkan kekuasaan dan sumber daya (Black, 2015). Adapun hal lainnya yang penting untuk diketahui bahwa Jika dilihat dari perspektif sejarah bahwa hubungan konflik antara Iran dengan Arab Saudi dimulai ketika adanya Revolusi Republik Islam Iran 1979 dan Perang Iraq-Iran 1980-1988 (Boone, 2012, p. 1). Peristiwa Revolusi Republik Islam Iran merupakan salah satu bentuk

penggulingan kekuasaan rezim monarki yang didalamnya juga terdapat konflik sektarian Sunni dan Syi'ah (Samosir, 2016).. Lebih lanjut bahwa konflik Iran dan Arab Saudi semakin berkembang pada keterlibatan Arab Saudi dalam mendukung Iraq untuk melawan Iran dalam peristiwa Perang Iraq-Iran 1980-1988. Sehingga kedua peristiwa di atas menunjukkan awal dari adanya rivalitas Iran dan Arab Saudi di Timur Tengah.

Adapun hal lainnya yang dapat mendorong adanya rivalitas Arab Saudi dan Iran adalah implikasi dari adanya invasi Iraq oleh Amerika Serikat tahun 2003. Lebih lanjut implikasi yang dimaksud adalah penggulingan Presiden Saddam Hussein oleh populasi Syi'ah di Iraq. Untuk itu, Arab Saudi memandang bahwa kekuatan populasi Syi'ah khususnya di Iraq dapat menjadi ancaman karena memudahkan dalam memobilisasi kekuatan Iran yang akan menyebarkan gagasan revolusioner Islam (Erickson, 2017).

Lebih jauh lagi bahwa konflik antara Iran dengan Arab Saudi semakin berkelanjutan terutama pada saat *Arab Springs* tahun 2010. Fenomena Arab Spring merupakan aksi protes secara masif yang menginginkan perubahan rezim otoriter menuju demokratis di Timur Tengah (Erickson, 2017). Adapun peristiwa tersebut membuat Arab Saudi semakin khawatir karena akan mengancam keberadaan rezim monarki itu sendiri yang dipandang Arab Saudi sebagai identitas penting dalam politik internasional. Lebih lanjut, *Arab Springs* dapat mempengaruhi dinamika secara politik dan sosial terhadap masyarakat Saudi yang menganut paham Syi'ah khususnya di Provinsi Timur (Matthiesen, 2012, pp. 628-630).

Kemudian alasan lainnya yang mendorong Arab Saudi untuk senantiasa meningkatkan konfrontasi dengan Iran karena adanya program pengembangan nuklir Iran. Dengan adanya program pengembangan nuklir Iran menjadi salah satu bukti terhadap kekuatan militer yang semakin signifikan dan dapat mengancam stabilitas politik dan keamanan Arab Saudi di kawasan Timur Tengah (Guzanski, 2015). Lebih lanjut, program nuklir Iran yang semakin berkembang tentunya didukung oleh adanya pencabutan sanksi ekonomi yang memudahkan Iran dalam mendapatkan keuntungan secara ekonomi (Armandhanu, 2016).

Namun hal lainnya yang penting untuk diketahui bahwa hubungan konflik antara Iran dengan Arab Saudi yang pada awalnya disebabkan oleh dimensi sektarianisme. Akan tetapi pengaruh dari adanya perbedaan paham keagamaan berkembang menjadi kompetisi secara geopolitik yang menciptakan rivalitas kedua negara hingga saat ini (Adib-Moghaddam, 2016). Untuk itu, faktor geopolitik yang menimbulkan konfrontasi dapat dilihat melalui keterlibatan Iran dan Arab Saudi dalam konflik di Suriah dan Yaman.

Dalam konteks konflik yang terjadi di Suriah tahun 2016, Arab Saudi telah berkontribusi dalam mendukung pemberontak dengan mengirimkan pasukan perang (FM, 2016). Di satu sisi, adanya pengiriman pasukan tentunya dapat dipahami sebagai sarana pemerintah Arab Saudi untuk menjatuhkan kepemimpinan Presiden Bashar Al-Assad. Di sisi lain bahwa tujuan dari pemerintah Arab Saudi untuk terlibat secara tidak langsung dalam konflik di Suriah adalah ingin meminimalisir pengaruh

Iran yang didapatkan melalui Hizbullah yang dilabeli oleh Dewan Kerja sama Teluk sebagai kelompok terorisme untuk menopang rezim Bashar Al-Assad (Arhab, 2016).

Di satu sisi, dengan meminimalisir pengaruh dari Hizbullah tentunya akan memudahkan Arab Saudi dalam menggeser posisi geopolitik Iran. Di sisi lain Presiden Bashar Al-Assad dalam persaingan di Timur Tengah. Terlepas dari adanya pelabelan organisasi terorisme yang ditujukan kepada Hizbullah perlu diantisipasi oleh berbagai pihak termasuk sekutu Arab Saudi karena telah didukung oleh pemerintah Iran.

Lebih lanjut bahwa Iran dan Arab Saudi juga terlibat secara tidak langsung dalam konflik di Yaman tahun 2015. Adapun keterlibatan dari pihak Arab Saudi dalam konflik Yaman yaitu mengirimkan pasukan dan melakukan kampanye militer untuk melawan pemberontak dari kalangan Syi'ah Houthi (Ighani, 2016). Informasi tersebut menunjukkan bahwa Iran tentunya mendukung pemberontak Syi'ah Houthi secara langsung karena kesamaan identitas. Maka dari itu kelompok Syi'ah Houthi dapat juga dilihat sebagai *Iranian Puppet* dalam mendapatkan kekuasaan (Fisher, 2016).

Dengan demikian konflik antara Iran dengan Arab Saudi yang pada akhirnya terlihat semakin memanas dapat dilihat ketika adanya eksekusi mati terhadap Syekh Nimr tahun 2016. Kemudian Syekh Nimr Al-Nimr merupakan ulama kharismatik yang memperjuangkan hak minoritas golongan Syi'ah di Arab Saudi. Adanya eksekusi tersebut tentunya akan semakin memicu konflik yang berkepanjangan antara

kedua belah pihak, sehingga hal tersebut tentunya harus diselesaikan sedemikian rupa, bahkan dapat menimbulkan dampak yang cukup signifikan.

Namun meningkatnya ketegangan antar kedua belah pihak yang mengarah pada konflik semakin terlihat ketika otoritas Arab Saudi telah menetapkan hukuman mati terhadap ulama kharismatik Syi'ah yaitu Syekh Nimr Al-Nimr dengan dakwaan terorisme (Samosir, 2016). Di satu sisi, dinamika yang terjadi pasca eksekusi mati diantaranya pemutusan hubungan diplomatik antara Iran dengan Arab Saudi yang juga diikuti oleh sekutu Arab Saudi dalam hal ini Uni Emirat Arab, Sudan, Bahrain dan Kuwait (Setyanti, 2016). Di sisi lain bahwa adanya eksekusi mati terhadap Syekh Nimr tentunya akan semakin menghambat upaya perdamaian untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah, misalnya perang di Suriah (Behn, 2016).

Selanjutnya hal penting lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui bahwa adanya perbedaan identitas dalam hal paham keagamaan baik Iran maupun Arab Saudi tentunya berpengaruh dalam bertindak dan berperilaku dalam komunitas internasional. Perbedaan identitas tersebut bahwa Arab Saudi merupakan negara pemimpin Sunni dan Iran juga merupakan negara pemimpin Syi'ah di dunia. Walaupun terdapat perbedaan identitas dalam hal paham keagamaan tersebut dapat menjadi cara pandang dan pedoman dari masing-masing negara dalam mendeskripsikan dirinya di dunia internasional. Terlepas dari adanya paham keagamaan yang berbeda mengenai Islam dapat dipahami oleh negara lainnya sebagai karakteristik yang memiliki keunikan tersendiri yang membedakan satu negara dengan negara lainnya.

Sebagai aktor negara yang memiliki kewenangan secara penuh dalam mengatur urusan dalam dan luar negeri harus memanfaatkan potensi dirinya yaitu dengan menggunakan pembangunan identitas. Menindaklanjuti dari adanya konflik antara Iran dan Arab Saudi yang semakin kompleks membutuhkan seperangkat usaha untuk menghentikan ketegangan tersebut. Adapun usaha yang dimaksud adalah dengan menggunakan pendekatan damai.

Di satu sisi, jika konflik yang semakin memanas antara Iran dengan Arab Saudi tidak segera diselesaikan dikhawatirkan akan berdampak pada stabilitas politik, ekonomi dan keamanan khususnya di Timur Tengah. Di sisi lain bahwa dalam mengurangi ketegangan yang terjadi pada Arab Saudi dan Iran dapat menggunakan pendekatan damai. Jika dibandingkan dengan kekuatan militer maka akan memicu pertempuran baru di wilayah Timur Tengah.

Maka dari itu diharapkan konflik yang terjadi antara Arab Saudi dengan Iran dapat diselesaikan dengan sedemikian rupa mengingat bahwa kedua negara memiliki posisi penting di kawasan Timur Tengah. Berbicara mengenai posisi Arab Saudi dapat dilihat dalam perkembangan politik dan ekonomi di Timur Tengah. Hal ini dibuktikan dengan adanya paham Sunni yang mampu mendominasi secara mayoritas negara anggota Timur Tengah dalam usahanya untuk membendung kekuatan dari paham Syi'ah yang diprakarsai oleh Iran. Artinya penyebaran ideologi menjadi salah satu sarana Arab Saudi dalam meningkatkan kedudukannya di Timur Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya konflik antara Iran dan Arab Saudi tepatnya pasca eksekusi mati Syekh Nimr oleh pemerintah Arab Saudi membutuhkan upaya yang berkelanjutan untuk mendamaikan kedua belah pihak. Untuk itu dalam tulisan ini akan mengkaji **bagaimana upaya Arab Saudi terhadap Organisasi Kerja sama Islam dalam menyelesaikan konflik Iran dan Arab Saudi tahun 2013-2018?**

Adapun peneliti mengambil negara Arab Saudi karena memiliki posisi penting di Timur Tengah terutama dalam memperkuat eksistensi dari Organisasi Kerja sama Islam yang merupakan organisasi terbesar kedua setelah PBB yang memfokuskan pada penyelesaian konflik yang melanda umat Islam di dunia. Selain itu Arab Saudi merupakan negara yang memprakarsai dalam menyebarluaskan aliran keagamaan Sunni secara terus menerus yang pada akhirnya membuat banyak negara anggota Organisasi Kerja sama Islam di wilayah Timur Tengah mengadopsi paham Sunni tersebut. Artinya secara mayoritas, paham Sunni mendominasi di kawasan Timur Tengah.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dibuat bertujuan untuk :

1. Menganalisis upaya Arab Saudi terhadap internal kelembagaan Organisasi Kerja sama Islam dalam menyelesaikan konflik Iran dan Arab Saudi tahun 2013-2018.
2. Untuk mengetahui instrumen yang digunakan oleh Arab Saudi terhadap Organisasi Kerja sama Islam dalam menyelesaikan konflik Iran dan Arab Saudi tahun 2013-2018.

1.4 Signifikansi

Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba untuk memberikan analisis kritis terkait penyelesaian konflik di kawasan Timur Tengah dalam hal ini antara Iran dengan Arab Saudi yang akan dilakukan oleh Organisasi Kerja sama Islam dari sudut pandang Arab Saudi. Artinya Arab Saudi senantiasa ingin memberikan upaya terhadap organisasi Islam tersebut dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik Iran dan Arab Saudi yang semakin berkelanjutan. Hal lainnya bahwa Arab Saudi melihat potensi yang dimiliki oleh negaranya dapat dijalankan melalui keterlibatan aktif dalam Organisasi Kerja sama Islam.

1.5 Cakupan Penelitian

Adanya cakupan penelitian bertujuan untuk memberikan batasan terhadap pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Selain itu cakupan penelitian memberikan upaya dalam menentukan konsep atau pendekatan dari suatu permasalahan, sehingga berbagai permasalahan yang muncul dalam penelitian ini dapat dipahami dengan baik. Lebih lanjut bahwa pokok permasalahan yang ditemukan dalam penelitian tentunya harus dibatasi dengan sedemikian rupa.

Hal ini dilakukan agar peneliti mampu menginterpretasikan hasil penelitiannya sesuai dengan pokok permasalahan dan menghindari kerancuan terhadap objek yang diamati. Oleh karena itu berbicara mengenai ruang lingkup dari penelitian ini yaitu analisa mengenai pengaruh Arab Saudi terhadap Organisasi Kerja sama Islam dalam menyelesaikan konflik Iran dan Arab Saudi tepatnya pasca eksekusi mati syekh Nimr Al-Nimr tepatnya pada tahun 2013-2018. Adapun hal

lainnya yang penting untuk diketahui bahwa peneliti juga beranggapan ruang lingkup yang dijelaskan di atas dimaksudkan sebagai penegasan mengenai batasan-batasan objek.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, penulis akan membagi ke dalam empat bab. Pada dasarnya bab 1 akan menjelaskan mengenai latar belakang dan permasalahan. Dalam bab 1, penulis akan memberikan informasi tentang konflik antara Iran dengan Arab Saudi yang semakin memanas tepatnya dalam kurun waktu 2013-2018. Selain itu, penulis akan mengangkat permasalahan mengenai pengaruh Arab Saudi terhadap Organisasi Kerja sama Islam dalam menyelesaikan konflik Iran dan Arab Saudi. Adapun dalam bab 1 juga akan dibahas mengenai teori yang akan digunakan oleh peneliti dalam menjawab topik permasalahan yang sedang dibahas.

Kemudian pada bab 2, penulis akan memaparkan hubungan Iran dan Arab Saudi dari perspektif sejarah, hubungan konflik antar kedua negara beserta sebab terjadinya konflik dan perkembangan hubungan diplomatik kedua negara hingga saat ini. Dalam bab 2 juga akan dijelaskan terkait dampak konflik Iran dan Arab Saudi terhadap internal kelembagaan Organisasi Kerja sama Islam maupun di regional Timur Tengah.

Selanjutnya pada bab 3 akan menjelaskan tentang instrumen yang akan digunakan oleh Arab Saudi terhadap Organisasi Kerja sama Islam itu sendiri dalam memberikan usahanya untuk menyelesaikan konflik Iran dan Arab Saudi yang semakin berkelanjutan. Lebih lanjut bahwa dalam bab 3 akan memberikan suatu

analisis terkait bagaimana Arab Saudi dapat menggunakan upayanya terhadap aktivitas Organisasi Kerja sama Islam dalam menyelesaikan konflik Iran dan Arab Saudi berdasarkan Teori Aktor Rasional. Adapun dalam bab 3 dijelaskan juga mengenai kepentingan Arab Saudi dalam memberikan pengaruhnya terhadap OKI untuk terlibat secara langsung dalam penyelesaian konflik tersebut.

Terakhir bab 4 yaitu kesimpulan dan saran. Dalam bab ini, penulis akan memberikan uraian secara garis besar terkait pengaruh Arab Saudi terhadap Organisasi Kerja sama Islam dalam mengatasi konflik Iran dan Arab Saudi berdasarkan temuan dan data yang telah didapatkan melalui studi kepustakaan. Maka dari itu dalam bab ini juga memberikan gambaran untuk kedepannya terkait efek dan hasil dari keterlibatan secara langsung Arab Saudi dalam internal kelembagaan OKI untuk menyelesaikan konflik ini. Hal penting lainnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya juga membutuhkan saran yang bertujuan untuk menyempurnakan gagasan yang telah disampaikan oleh penulis.

1.7 Kajian Pustaka

Secara umum dalam penelitian ini akan memfokuskan pada analisa peran Organisasi Kerja sama Islam dalam menyelesaikan konflik Iran dan Arab Saudi pasca eksekusi mati Syekh Nimr Al-Nimr. Maka dari itu, peneliti berusaha untuk mencoba mengidentifikasi berbagai tulisan yang membahas keterlibatan Organisasi Kerja sama Islam terutama dalam menyelesaikan konflik yang melanda umat Islam di seluruh dunia khususnya di regional Timur Tengah. Lebih lanjut bahwa OKI dapat menjadi organisasi Islam dalam misinya untuk membangun perdamaian di dunia internasional.

Intervensi yang dilakukan OKI dapat ditelusuri pada keterlibatannya dalam isu pelanggaran HAM di Kashmir yang disampaikan oleh Raja Amir Hanif yang ditulis pada *Journal of Peace Studies History* yang berjudul "*Pakistan, OIC and The Challenges of Muslim World*". Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa isu pelanggaran hak asasi manusia di Kashmir turut didiskusikan dalam forum OKI yang juga melibatkan pemerintah Pakistan, India, dan koordinasi dengan PBB. Namun pada awalnya isu ini dibahas atas inisiasi dari Pakistan untuk didiskusikan dalam berbagai forum OKI.

Dengan adanya inisiasi dari Pakistan membuat OKI untuk membangun relasi konstruktif dengan PBB dan pemerintah India. Pada akhirnya berbagai perundingan telah dilakukan melalui forum OKI dan berhasil dalam mengamankan berbagai resolusi konflik. Adapun resolusi tersebut mengancam pelanggaran HAM yang dilaporkan oleh pasukan perdamaian India di Kashmir dan juga memberikan bantuan

dana kepada pemerintah Pakistan untuk mengatasi pelanggaran HAM di Kashmir (Hanif, 2014, pp. 48-49).

Hal ini membuktikan bahwa OKI menjadi forum dalam dukungan politik pemerintah Pakistan. Adapun peneliti menilai bahwa dalam tulisan tersebut belum menjelaskan mengenai keefektifan dari adanya suatu resolusi yang ditetapkan oleh OKI terkait pelaksanaan hak asasi manusia dan belum menjamin bahwa resolusi yang dikeluarkan dapat berjalan dengan sedemikian rupa.

Keterlibatan lainnya dari OKI dalam konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya dapat dilihat pada upaya OKI dalam menyelesaikan konflik antara Organisasi Pembebasan Palestina dengan Jordania. Untuk itu peneliti akan mengutip tulisan yang dimuat dalam *Intellectual Discourse* yang ditulis oleh Abdullah Al-Hasan yang berjudul *Conflict among Muslim Nations: Role of the OIC in Conflict Resolution* menyatakan bahwa faktor yang memicu terjadinya konflik yang terjadi kepada kedua belah pihak adalah perbedaan instrumen yang digunakan untuk melawan Israel.

Pihak dari Organisasi Pembebasan Palestina lebih cenderung menggunakan pendekatan secara militer, sedangkan pihak dari Jordania memilih dengan pendekatan yang lebih pragmatis yang berarti tidak menggunakan cara kekerasan. Sehingga dengan adanya konflik yang berkepanjangan membuat OKI untuk terlibat aktif dalam penyelesaian konflik tersebut. Adapun upaya yang dilakukan adalah melalui mediasi yang juga melibatkan pemerintah Arab Saudi dan Mesir.

Dalam proses mediasi tersebut yang dilakukan oleh OKI, Arab Saudi, dan Mesir pada akhirnya membuahkan hasil yaitu dibuatnya perjanjian yang menyatakan bahwa baik Jordania maupun Organisasi Pembebasan Palestina diberikan tempat untuk memainkan politik di Palestina serta secara bertahap Organisasi Pembebasan Palestina menerima pengakuan internasional sebagai satu-satunya wakil dari rakyat Palestina (Al-Ahsan, 2004, pp. 139-140). Menurut peneliti, tulisan di atas menandakan bahwa mediasi yang melibatkan OKI telah mencapai keberhasilan akan tetapi dalam tulisan tersebut belum menjelaskan secara spesifik mengenai kepentingan Arab Saudi dalam mendamaikan kedua belah pihak.

Adapun dalam tulisan lainnya yang ditulis oleh Ibrahim Sharqieh yang berjudul "*Can the Organization of Islamic Cooperation (OIC) Resolve Conflicts?*" dalam *Peace and Conflict Studies* menjelaskan mengenai upaya OKI dalam menyelesaikan konflik antara Iran dengan Irak. Dalam tulisan tersebut menjelaskan bahwa adanya perselisihan tersebut disebabkan oleh masalah sektarian antara Sunni dengan Syi'ah yang disertai dengan aksi kekerasan, bahkan dalam perselisihan tersebut kehidupan warga sipil semakin terancam.

Perselisihan di atas menyebabkan OKI harus terlibat dengan memfasilitasi kedua belah pihak melalui rekonsiliasi atau perundingan damai yang bertempat di Makkah. Adapun perundingan damai yang diinisiasi oleh OKI mampu menyelesaikan konflik tersebut dengan menetapkan resolusi yang dikenal dengan Deklarasi Makkah yang menyatakan bahwa seluruh kaum muslimin di Irak dan Iran harus senantiasa

menolak untuk saling membunuh antar umat Islam dan harus menjaga kedaulatan dan martabat setiap individu (Sharqieh, 2012, pp. 168-169).

Berdasarkan informasi tersebut bahwa dapat dilihat sebagai pencapaian OKI dalam menyelesaikan konflik sektarian antara Iran dengan Iraq. Perdamaian sosial yang diharapkan oleh komunitas Islam di seluruh dunia tentunya menjadi agenda penting dari OKI. Selain itu menurut peneliti bahwa dalam tulisan tersebut seharusnya juga menjelaskan pengaruh yang dapat ditimbulkan dari adanya perselisihan Iran dan Iraq khususnya di kawasan Timur Tengah terutama dalam aspek politik dan ekonomi.

Lebih lanjut untuk menganalisa peran dari Organisasi Kerja sama Islam dalam menyelesaikan konflik, peneliti akan mengutip buku yang ditulis oleh Turan Kayaoglu yang berjudul *The Organisation of Islamic Cooperation : Politics, Problem, and Potential*. Dalam buku ini dijelaskan bahwa Organisasi Kerja sama Islam memiliki potensi untuk menyelesaikan konflik yang melanda umat Islam dengan menggunakan pendekatan *cultural competency, moral power, and partnership*.

Selain itu dalam buku ini menekankan pada analisa peran OKI dalam menyelesaikan konflik Iran dan Iraq melalui kemitraan (*partnership*) dengan organisasi internasional dalam hal ini adalah PBB dan cenderung berhasil (Kayaoglu, 2015, p. 70). Untuk itu adanya relasi dengan PBB membuat OKI dapat berpengaruh lebih luas dalam usahanya untuk menjadi salah satu agen resolusi konflik dan dapat meningkatkan kredibilitas di dunia internasional.

Adapun dalam tulisan ini masih ditemukan berbagai kekurangan yaitu belum menjelaskan kepentingan dari PBB untuk terlibat secara langsung dalam konflik Iran dan Iraq. Selain itu tulisan ini belum memaparkan secara spesifik alasan OKI menggunakan pendekatan kemitraan dengan PBB dibandingkan menggunakan kekuatan moral dan kompetensi budaya. Maka dari itu penting untuk dijelaskan juga mengenai kepentingan OKI melalui keterlibatannya dengan PBB dalam membawa misi perdamaian khususnya di Timur Tengah.

Berbicara mengenai keterlibatan OKI dalam mengatasi konflik dapat kita lihat pada konflik di Yaman, sehingga peneliti mengutip tulisan M. Ihsan Qadir & M. Saifur Rehman yang berjudul "*Organization of Islamic Co-operation (OIC) and Prospects of Yemeni Conflict Resolution : Delusion or Plausible Reality*" yang dimuat dalam *Journal of Political Studies*. Dalam tulisan tersebut menyatakan bahwa peran OKI dalam menyelesaikan konflik di Yaman hanya terbatas pada penetapan resolusi konflik, menjadi mediator dan menuntut adanya intervensi dari negara anggota OKI lainnya yang senantiasa akan mempengaruhi kredibilitas OKI sebagai organisasi antar pemerintah yang telah diakui secara internasional untuk mengatasi berbagai perselisihan (Rehman, 2015, pp. 373-378).

Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi OKI dalam mencapai kepentingannya yang senantiasa akan menjadi suatu indikator bagi masyarakat internasional untuk menilai seberapa efektif OKI mampu menciptakan perdamaian di negara Islam. Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh OKI dalam konteks konflik di Yaman dinilai cukup efektif. Namun tulisan tersebut belum menjelaskan terkait

adanya jaminan bahwa negara anggota OKI tidak terlibat dalam konflik di Yaman dan adanya pengaruh rivalitas antara Iran dan Arab Saudi.

Selanjutnya peneliti akan mengutip tulisan Mohamed Bin Huwaidin yang berjudul “*The Security Dilemma in Saudi-Iranian Relations*” yang dimuat pada *Review of History and Political Science*. Dalam tulisan ini telah memaparkan informasi mengenai rivalitas antara Arab Saudi dengan Iran dalam menyebarkan pengaruhnya khususnya di Yaman. Adanya rivalitas antara kedua negara pada awalnya disebabkan oleh adalah faktor ideologi yaitu perbedaan paham keagamaan dalam hal ini Sunni dan Syi’ah (Huwaidin, 2015, pp. 73-76).

Arab Saudi menganggap bahwa keberadaan Syi’ah Houthi di Yaman merupakan suatu ancaman karena dikhawatirkan sebagai wakil dari Iran untuk meningkatkan pengaruhnya dan mengendalikan negara tersebut. Untuk itu, upaya yang dilakukan oleh Arab Saudi untuk menjauhkan pengaruh Yaman dari Iran adalah dengan menciptakan koalisi militer. Tulisan ini telah menjelaskan faktor yang membuat Iran dan Arab Saudi mengalami ketegangan akan tetapi belum menjelaskan terkait tindakan yang akan diambil oleh Iran dalam mengatasi serangan militer Arab Saudi.

Adapun dalam tulisan Reza Ekhtiari Amiri yang berjudul “*Iraqi Invasion of Kuwait as Turning Point in Iran-Saudi Relationship*” dan dimuat dalam *Journal of Politics and Law* menjelaskan bahwa awal ketegangan antara Iran dan Arab Saudi ketika tahun 1979 yang ditandai dengan peristiwa Revolusi Republik Islam Iran dan juga diikuti dengan adanya perang Iran dan Iraq tahun 1980. Lebih lanjut bahwa Arab

Saudi telah mengintervensi dengan memberikan bantuan ekonomi dan militer untuk mendukung Iraq serta membentuk Dewan Kerja sama Teluk untuk mengatasi ancaman dari Iran, sehingga dukungan Arab Saudi terhadap Iraq menimbulkan ketegangan antara Arab Saudi dengan Iran (Amiri, 2011, pp. 188-189).

Maka dari itu Arab Saudi berusaha untuk memperkuat perannya di regional Timur Tengah melalui dukungan terhadap Iraq dalam perang antara Iraq dengan Iran. Tulisan ini menjelaskan implikasi dari adanya perang Iraq dan Iran terhadap hubungan Iran dan Arab Saudi terutama pasca Revolusi Republik Islam Iran yang menjadi peristiwa bersejarah di Timur Tengah. Terlepas dari hal tersebut, peneliti menilai bahwa tulisan ini belum menjelaskan perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Iran setelah peristiwa Revolusi Republik Islam Iran.

Lebih lanjut untuk memahami konflik yang terjadi antara Iran dan Arab Saudi, peneliti mengutip tulisan Mahdi Alikhani & Mehdi Zakerian yang berjudul "*Study of Factors Affecting Saudi-Iranian Relations and Conflicts and Their Resulting Behavior Pattern*" yang dimuat dalam *Journal of Politics and Law*. Adapun tulisan ini menjelaskan bahwa pola hubungan antara Arab Saudi dengan Iran yang cenderung mengarah pada konflik disebabkan oleh perubahan geopolitik di regional Timur Tengah, struktur yang memberikan penekanan pada hubungan luar negeri terutama dengan Amerika Serikat dan berkaitan dengan cara kedua negara dalam mendistribusikan kekuasaannya di Teluk Persia (Zakerian, 2016, pp. 178-183).

Untuk itu berkaitan dengan faktor geopolitik yaitu yang termasuk dalam perbedaan paham ideologi negara dalam memahami karakteristik dan keunikan dari suatu wilayah. Hal lainnya yang juga penting bahwa faktor struktural juga memainkan peranan penting dalam konflik antar kedua negara dalam hal ini adalah program nuklir Iran yang dapat memberikan ancaman terhadap kekuatan Arab Saudi. Lebih lanjut tulisan ini telah memberikan penjelasan beberapa faktor yang mengarahkan pada konflik Iran dan Arab Saudi. Namun dalam tulisan ini belum menjelaskan hubungan Iran dan Amerika Serikat dalam hal keberlanjutan program nuklir Iran hingga saat ini.

Kemudian peneliti mengutip tulisan Kevin Downs yang berjudul “*A Theoretical Analysis of the Saudi-Iranian Rivalry in Bahrain*” dalam *Journal of Politics and International Studies* menjelaskan mengenai rivalitas Iran dan Arab Saudi khususnya di Bahrain. Tulisan ini menjelaskan bahwa permasalahan ekonomi yang terjadi di Bahrain memicu protes dari kelompok Syi’ah dan menyuarakan untuk pergantian kekuasaan di dalam pemerintahan. Adanya hal ini membuat Arab Saudi terlibat untuk mempertahankan kekuasaan karena apabila keluarga Al-Khalifa berhasil dijatuhkan dan dengan meningkatnya dukungan untuk pemerintah pro-Iran, maka akan menjadi suatu ancaman terhadap stabilitas keamanan nasional Arab Saudi (Downs, 2013, pp. 205-212).

Oleh karena itu Arab Saudi ingin tetap mempertahankan dominasinya terhadap Bahrain dari pengaruh Iran. Kekhawatiran dari Arab Saudi menandakan bahwa Iran mencoba untuk menyebarkan ide revolusionernya ke negara-negara di

regional Timur Tengah. Lebih lanjut tulisan ini telah menyatakan bahwa salah satu aspek yang penting dalam politik adalah meningkatkan ketergantungan dengan negara yang kuat dalam mempertahankan kekuasaan. Namun dalam tulisan ini belum menjelaskan tindakan Iran dalam melindungi kepentingannya di Bahrain ditengah persaingannya dengan Arab Saudi.

Dengan demikian melihat dari penelitian-penelitian dan sebelumnya, peneliti beranggapan bahwa sampai saat ini belum ditemukan tulisan mengenai peran Arab Saudi dalam menyelesaikan konflik antara Iran dengan Arab Saudi melalui Organisasi Kerja sama Islam. Sehingga dalam tulisan ini peneliti akan memfokuskan pada pembahasan mengenai upaya Arab Saudi terhadap Organisasi Kerja sama Islam dalam menyelesaikan konflik Iran dan Arab Saudi dalam kurun waktu 2013-2018. Lebih lanjut, pembahasan dalam tulisan ini akan menggunakan sudut pandang dari Arab Saudi.

1.8 Landasan Teori

1.8.1 Teori Aktor Rasional

Pada dasarnya manusia telah diberikan akal dan pengetahuan untuk berfikir terhadap sesuatu. Artinya setiap manusia harus mampu menggunakan pemikirannya untuk menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadapi dalam berkehidupan. Adapun kaitannya dengan teori aktor rasional beranggapan bahwa manusia bersifat rasional, sehingga tindakan yang dilakukan oleh aktor tertentu dianggap rasional karena mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman (Rafael Witteck, 2013, pp. 1-2). Lebih lanjut peneliti dalam menjelaskan teori aktor rasional lebih cenderung menggunakan gagasan Graham T. Allison.

Menurut Graham T. Allison bahwa dalam menentukan politik luar negeri suatu negara harus memperhatikan berbagai konsekuensi yang akan diterima dari kebijakan tersebut. Penjelasan di atas merupakan suatu interpretasi dari pernyataan Graham T. yaitu : *“governments select the action that will maximize strategic goals and objectives”* (Allison G. T., 1971, p. 32). Adapun gagasan Graham di atas juga menjelaskan bahwa objek dari teori aktor rasional mengacu pada bagaimana pengambil keputusan (*decision maker*) dapat menentukan perilakunya dalam mencapai kepentingan luar negerinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan negara tersebut (Paul Anand, 2009, p. 16).

Untuk itu pengambilan keputusan yang biasanya dilakukan oleh pemimpin suatu negara didasarkan pada sesuatu yang sangat diperlukan negaranya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki negara tersebut. Artinya kapasitas yang dimiliki oleh suatu negara harus mampu menerima resiko dari pelaksanaan kebijakan luar negeri. Maka dari itu aktor negara selalu mengedepankan aspek kebutuhan dari pada keinginan.

Dari paparan informasi di atas, peneliti beranggapan bahwa secara tradisional, suatu negara harus memiliki posisi penting dalam keberlangsungan hidupnya. Apalagi yang berkaitan erat dengan politik luar negeri, sehingga dengan adanya posisi tawar-menawar (*bargaining position*) yang semakin tinggi tentunya dapat dipahami negara lain sebagai kekuatan dalam membangun hubungan luar negeri. Maka pada akhirnya posisi tersebut dapat menarik perhatian dari negara lainnya untuk mendapatkan apa yang negara tersebut butuhkan.

Selain itu, berdasarkan dari pemikiran Graham T. Allison mengungkapkan bahwa negara dikatakan sebagai aktor rasional yang mampu menentukan pilihan kebijakan yang paling menguntungkan dalam mencapai kepentingannya (Allison, 1971, p. 33). Lebih lanjut asumsi di atas mengacu pada pentingnya kemampuan negara dalam memilih keputusan karena akan mempengaruhi hasil akhir. Untuk itu, negara melalui pemerintahnya harus menghindari konsekuensi yang paling merugikan dalam mencapai tujuannya.

Adapun asumsi di atas juga dapat mendukung anggapan bahwa negara menjadi pemain utama dalam hubungan internasional karena berkaitan erat dengan hasil kompetisi antar aktor (Shahryarifar, 2016, pp. 25-26). Akan tetapi hal lainnya yang dianggap penting untuk diketahui bahwa seiring dengan perkembangan zaman dan semakin kompleksnya suatu permasalahan yang terjadi tentunya aktor individu dalam hal ini pemimpin suatu negara juga dianggap penting dalam perkembangan dunia politik. Maka dari itu teori aktor rasional berkaitan dengan prosedur pembuatan keputusan.

Sementara itu sebagai makhluk yang rasional tentunya memiliki berbagai kepentingan sesuai dengan tujuan (*goals*) yang ingin dicapai oleh aktor negara. Dalam mencapai tujuannya, aktor harus menentukan berbagai alternatif yang akan membawa mereka menuju keuntungan yang maksimal, sehingga penting untuk menentukan tindakan yang diprioritaskan (Borgotta, 1992, p. 34). Adapun dalam konteks politik internasional, perilaku yang dilakukan oleh suatu negara menjadi pertimbangan dalam merealisasikan agendanya.

Asumsi lainnya dari teori aktor rasional yang mendukung gagasan Graham T. Allison mengacu pada penggunaan cara yang bersifat efisien dalam mencapai keuntungan yang paling maksimal dan berusaha untuk menghindari tindakan yang mengarah pada perolehan kerugian (Budiardjo, 2013, p. 93). Terlepas dari hal tersebut perilaku manusia hanya merupakan instrumen dalam untuk melakukan perhitungan yang rasional dan merumuskan perilaku dari aktor lainnya. Maka dari itu optimalisasi kepentingan dapat dipahami sebagai inti dari teori aktor rasional.

Selain itu tujuan dan sasaran yang tersusun secara sistematis oleh negara setidaknya akan mencerminkan preferensinya terkait tindakan apa yang diperlukan (Jonge, 2012, pp. 7-9). Di satu sisi setiap manusia memiliki keterbatasan dalam hal berfikir karena didasarkan pada pengetahuan yang mereka dapatkan. Di sisi lain bahwa pembuatan pilihan harus senantiasa dipertimbangkan dan dioptimalkan karena akan mempengaruhi hasil.

Lebih lanjut aplikasi dari teori aktor rasional di atas dalam tulisan ini yaitu aktor negara dalam hal ini pemerintah di bawah kepemimpinan Raja Salman menentukan tindakan yang lebih diutamakan dalam mencapai kepentingannya. Berbicara mengenai salah satu kepentingan yang diprioritaskan saat ini adalah menyelesaikan konflik Iran dan Arab Saudi. Selanjutnya negara Arab Saudi dibawah kepemimpinan Raja Salman dapat menyusun berbagai tindakan yang akan dilakukan oleh Organisasi Kerja sama Islam dalam menyelesaikan konflik tersebut. Kemudian Arab Saudi melakukan identifikasi dan analisa berbagai pilihan yang telah tersedia.

Langkah berikutnya yaitu Arab Saudi akan senantiasa menelusuri terkait biaya dan manfaat yang akan didapatkan setelah menentukan pilihan. Namun dalam tahapan ini, aktor dalam hal ini negara harus mampu memperkirakan berbagai konsekuensi yang akan terjadi jika memilih opsi yang dianggap paling menguntungkan. Artinya bahwa tidak hanya melibatkan keuntungan maupun kerugian semata akan tetapi harus mampu merumuskan efek jangka pendek dan jangka panjang jika pilihan terbaik tersebut menjadi opsi yang paling baik.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang kenyataan di antara berbagai faktor atau berbagai gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu dalam penelitian ini akan digunakan metode analisis deskriptif yang berupaya untuk menjelaskan dan mendeskripsikan secara rinci mengenai objek penelitian yaitu pengaruh Arab Saudi terhadap Organisasi Kerja sama Islam dalam menyelesaikan konflik Iran dan Arab Saudi pasca eksekusi mati Syekh Nimr Al-Nimr (Casterle, 2012, p. 4). Selanjutnya berbicara mengenai penelitian kualitatif adalah suatu prosedur dalam penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari berbagai perilaku seseorang yang diamati (Moloeng, 1994, p. 3).

Artinya dalam hal ini penelitian kualitatif memfokuskan pada pengamatan aktivitas-aktivitas manusia untuk memperoleh suatu kebenaran dan keaslian terhadap objek yang diteliti. Maka dari itu proses dari pengumpulan data adalah bagian terpenting dari penelitian kualitatif dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif dikenal dengan sifat penelitian dalam hal ini adalah deskriptif.

Maksud dari deskriptif adalah penggambaran secara mendalam yang berkaitan dengan situasi tertentu. Mengingat sifat ini maka penelitian kualitatif tidak berupaya untuk menguji hipotesis. Bukan berarti bahwa penelitian ini tidak memiliki asumsi awal yang menjadi permasalahan dalam penelitian. Namun penelitian kualitatif

mencoba untuk mencari kepastian terhadap objek yang diteliti, sehingga tidak ada usaha untuk menguji hipotesis.

Oleh karena itu dalam penelitian ini laporan yang ditulis adalah berupa narasi cerita yang menggambarkan secara luas objek yang diamati. Hal yang terpenting bahwa alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena akan memudahkan peneliti dalam mencari data-data yang mendukung peneliti dalam membuat hasil analisa terkait pengaruh Arab Saudi terhadap Organisasi Kerja sama Islam dalam menyelesaikan konflik yang melanda umat Islam di seluruh dunia, terutama antara Iran dengan Arab Saudi.

Alasan lainnya bahwa laporan dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif. Lebih lanjut penggunaan analisis deskriptif tentunya akan memudahkan pembaca dalam memahami proses pengumpulan data yang dapat mendukung argumen penulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan demikian, setiap kasus atau fenomena dalam kehidupan masyarakat yang ada akan diperlakukan sebagai suatu entitas yang unik.

1.9.2 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan Arab Saudi sebagai subjek penelitian. Adapun penggunaan Arab Saudi sebagai subjek penelitian dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam menentukan pengaruh Arab Saudi terhadap Organisasi Kerja sama Islam tersebut dalam menyelesaikan suatu konflik. Selain itu alasan lainnya yang mendorong Arab Saudi untuk dijadikan sebagai subjek penelitian karena

sebagai aktor penting yang memiliki pengaruh cukup besar dalam perkembangan politik di Timur Tengah.

Dengan demikian, peneliti akan memperoleh berbagai informasi penting terkait topik penelitian ini, sehingga pemilihan subjek penelitian di atas tentunya lebih menenkankan pada data apa yang sedang dicari untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

1.9.3 Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini akan digunakan teknik pengumpulan data dengan metode studi kepustakaan atau studi literature yaitu dengan menelusuri berbagai dokumen yang disajikan dalam buku-buku, jurnal, dan berbagai artikel yang memuat tentang informasi yang juga berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini (Corbin, 1998, p. 326). Artinya penulis dalam penelitian ini akan menggunakan data-data dan informasi untuk mendapatkan berbagai aktivitas dan pengaruh Arab Saudi terhadap Organisasi Kerja sama Islam dalam usahanya untuk menciptakan resolusi konflik antara Iran dan Arab Saudi.

Selain itu metode kepustakaan dianggap penting, mengingat bahwa penelusuran data melalui dokumen akan menjadi langkah awal peneliti dalam menganalisis data atau informasi penting yang akan menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Hal yang terpenting dalam mendapatkan informasi, peneliti harus memastikan bahwa data atau informasi yang didapatkan mengandung

suatu unsur kebenaran (validitas) yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai sumber dalam penelitian ini.

Selanjutnya dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam menjawab objek penelitian adalah menggunakan data sekunder. Data sekunder dapat dipahami sebagai informasi atau data yang didapat melalui tulisan, buku-buku, jurnal yang memuat informasi tentang pengaruh Arab Saudi dalam aktivitas yang akan dilakukan oleh Organisasi Kerja sama Islam untuk merespon konflik antara Iran dan Arab Saudi serta berusaha untuk menciptakan resolusi konflik tersebut melalui berbagai forum internasional yang diselenggarakan oleh organisasi tersebut atau secara institusional (Tracy Long-Sutehall, 2011, p. 336).

Artinya dalam hal ini penulis harus mengumpulkan data yang berkaitan dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Arab Saudi yang bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap Organisasi Kerja sama Islam terutama ketika isu konflik Iran dan Arab Saudi dibahas dalam forum kelembagaan resmi organisasi tersebut. Tujuan diperolehnya data atau informasi melalui data sekunder adalah sebagai usaha penulis dalam mengidentifikasi pola yang digunakan Organisasi Kerja sama Islam dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Oleh karena itu diharapkan informasi yang didapatkan oleh peneliti melalui studi kepustakaan dapat membantu pembaca dalam memahami upaya OKI dalam menindaklanjuti konflik yang terjadi antara Iran dengan Arab Saudi. Metode kepustakaan tentunya menjadi bagian yang penting dalam penelitian kualitatif karena menjadi salah satu rujukan setiap penulis yang menggunakan metode penelitian

kualitatif dalam merumuskan sebuah penelitian yang pada akhirnya disajikan dalam bentuk narasi, sehingga dalam hal ini memudahkan peneliti dalam mempersiapkan instrumen-instrumen penelitian.

1.9.4 Proses Penelitian

Berbicara mengenai proses dalam penelitian ini, peneliti cenderung melakukan analisa melalui beberapa tahap yang merujuk pada informasi yang ditulis oleh Creswell yakni mempersiapkan data untuk diolah dan dokumentasi data-data lainnya yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan (Creswell, 2003, p. 17). Tahap awal dalam menganalisis data adalah pengumpulan data yang telah didapatkan oleh peneliti yang memuat informasi terkait objek penelitian.

Dalam proses pengumpulan data kualitatif adalah data yang berupa perilaku atau fenomena, dan sikap yang diperoleh peneliti. Langkah kedua setelah proses pengumpulan data, penulis mencoba untuk membaca keseluruhan data atau informasi yang bertujuan untuk memahami ide-ide atau gagasan yang tersirat dalam data dan perlu diketahui dalam tahap pengumpulan data, peneliti juga mencatat informasi penting untuk melakukan kategorisasi.

Langkah ketiga dalam penelitian ini adalah melakukan pemetaan (*coding*) terhadap data-data yang diperoleh penulis dengan melakukan penamaan diantaranya hubungan konflik antara Iran dengan Arab Saudi, pengaruh Arab Saudi terhadap Organisasi Kerja sama Islam, strategi Arab Saudi dalam mempengaruhi Organisasi Kerja sama Islam dalam menciptakan resolusi konflik dan aktivitas Organisasi Kerja sama Islam dalam menindaklanjuti konflik Antara Iran dengan Arab Saudi.

Tahapan ini juga dapat dikatakan sebagai tahapan reduksi data yang berarti bagian dari kegiatan analisis, sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, mana yang harus dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang berkembang dan semua itu merupakan pilihan-pilihan yang analitis (Idrus, 2007, p. 182).

Dengan begitu proses reduksi data atau kategorisasi data dimasukkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, dan membuang data yang tidak diperlukan serta mengorganisasi data, sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan proses verifikasi. Langkah keempat yang dilakukan penulis adalah mengembangkan narasi yang didasarkan atas kategorisasi data atau informasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.

Pada tahap ini peneliti mencoba untuk membuat sebuah analisa dalam bentuk deskripsi yang disesuaikan atas hasil pemetaan data tersebut yang juga bertujuan sebagai langkah dalam menentukan penarikan kesimpulan terhadap objek dalam penelitian ini. Tahap kelima yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menuliskan hasil deskripsi terhadap temuan-temuan yang diperoleh ketika proses pengembangan narasi dan dalam tahap ini peneliti juga mencoba untuk melakukan interpretasi terhadap berbagai temuan dari penelitian ini.